

Siti Khairunnisa Hidayat

by UNITRI Press

Submission date: 13-Sep-2022 02:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 1898694731

File name: Siti_Khairunnisa_Hidayat.docx (45.4K)

Word count: 1279

Character count: 8369

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPKM BERBASIS MIKRO DI
KELURAHAN TLOGOMAS**

SKRIPSI



OLEH :

SITI KHAIRUNNISA H

NIM 2017210147

RINGKASAN

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dibuat karena kurang efektifnya kebijakan sebelumnya dalam penanganan Virus Covid-19 yaitu Kebijakan PPKM tahap I dan II. Kebijakan PPKM berbasis Mikro ini merupakan upaya menekan penyebaran Virus Covid-19 dengan lebih efektif dengan pendekatan yang lebih mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan PPKM berbasis Mikro di Kelurahan Tlogomas untuk menekan bertambahnya kasus penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi George Edward III dengan merumuskan empat faktor yang menjadi syarat utama keberhasilan proses implementasi yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan lisan dari informan yang dipilih yang diyakini paling memahami terkait implementasi kebijakan PPKM Mikro di Kelurahan Tlogomas yaitu Kepala Kelurahan Tlogomas, anggota Satgas Covid-19 Kelurahan Tlogomas, Ketua Posko PPKM Mikro tingkat RT dan RW Kelurahan Tlogomas, serta masyarakat Kelurahan Tlogomas dan pengamatan di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Waktu penelitian yang dilakukan yaitu selama tujuh hari. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi kebijakan PPKM berbasis Mikro pada Kelurahan Tlogomas yaitu sudah baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktor penghambat dalam penerapan kebijakan PPKM Mikro di Kelurahan Tlogomas yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya sumber daya finansial. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan PPKM Mikro namun hal tersebut dapat segera diatasi.

Kata Kunci: Kebijakan, PPKM Mikro, Pandemi.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada penghujung tahun 2019 lalu hampir seluruh Negara di dunia digemparkan dengan wabah penyakit menular yang mematikan yang berasal dari salah satu kota di Cina. Virus atau penyakit ini menyerang sistem pernapasan dan imun tubuh manusia sehingga dapat membunuh manusia. Berdasarkan penelitian Virus ini bersumber dari hewan dan dapat menyebar dengan sangat cepat melalui udara. Dalam waktu yang sangat singkat virus yang disebut *Corona Virus Disease* 2019 tersebut ²¹ menyebar hampir ke seluruh Negara di dunia salah satunya Negara Indonesia. Terdapat lebih dari 213 negara di dunia yang telah melaporkan *Corona Virus Disease* 2019.

Dihitung sejak awal masuknya virus ini ke Indonesia hingga saat ini dilaporkan bahwa telah lebih dari ratusan ribu masyarakat Indonesia yang telah ²³ terinfeksi. Sebagian besar pasien yang terinfeksi tersebut akhirnya meninggal dunia. Keadaan ini ²³ memberikan dampak yang cukup besar di berbagai bidang. Dari bidang ekonomi, pendidikan, pariwisata, social-budaya, dan terutama pada bidang kesehatan. Tentunya keadaan ini membuat pemerintah harus segera melakukan penanganan untuk menanggulangi penyebaran Virus tersebut dengan melihat semakin bertambahnya korban dan masih banyak masyarakat yang berjuang melawan virus tersebut.

Berdasarkan panduan WHO (*World Health Organization*) dalam merespon kondisi ini, yaitu memutuskan ²² rantai penyebaran Covid-19 dengan tidak keluar rumah, ²⁴ mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin dan beberapa panduan lainnya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik ⁶ Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan. Protokol kesehatan ¹² adalah ketentuan yang wajib diikuti oleh semua pihak untuk dapat beraktivitas dengan aman di masa ²⁵ pandemi ini. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur.

Selain itu, Presiden juga ⁹ mengeluarkan Instruksi Presiden Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 yang membahas hal terkait ⁹ guna menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19. Instruksi ini dibuat dengan

melihat belum maksimalnya pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Penerapan protokol kesehatan di masyarakat dinilai belum maksimal sehingga perlu adanya aturan tambahan. Adanya instruksi tersebut¹⁵ maka Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang kebijakan terkait.

Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah Kota Malang kembali meningkatkan disiplin protokol kesehatan mengingat Kota Malang termasuk dalam wilayah zona merah yang mana penduduk yang terinfeksi Covid-19 bertambah secara signifikan melalui⁸ Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Sebagaimana dilihat dari hasil selama penerapan protokol kesehatan di Kota Malang, masih sekitar 60% sisanya masyarakat masih tidak disiplin dalam melaksanakan Protokol Kesehatan.

Khususnya di Kecamatan Lowokwaru sebanyak 12 orang diamankan oleh petugas gabungan yang melaksanakan Operasi Yustisi penggunaan masker I wilayah Lowokwaru. Hal ini membuat kasus Covid-19 di Kota Malang semakin bertambah. Merujuk data Pemkot Malang, ada 273 kasus konfirmasi Covid-19 yang dalam pemantauan. Sebanyak 32 kasus di Kecamatan Kedung Kandang, 52 kasus di Sukun, 73 kasus di Blimbing, 49 kasus di Klojen, dan 67 kasus di Lowokwaru. (**Bisnis.com**)

Oleh karenanya adanya peraturan ini adalah bagian dari usaha pemerintah guna menegakan kedisiplinan warga dalam melaksanakan protokol kesehatan. Langkah ini termasuk menerapkan sanksi-sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Ini demi menekan bertambahnya kasus Covid-19 di Kota Malang.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Virus tersebut, mulai dari PSBB, kebijakan New Normal, PPKM hingga kebijakan terkait Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, namun belum dapat diatasi dengan baik. Sehingga dikeluarkan lagi kebijakan PPKM berbasis Mikro dalam peraturan terbaru oleh² Menteri Dalam Negeri yaitu Inmendagri Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan. Melalui instruksi ini Gubernur Jawa Timur membuat¹³ Keputusan Gubernur Nomor 188/58/KPTS/013/2021 tentang PPKM Berbasis Mikro.⁷ Demikian di tingkat Kota, Wali Kota Malang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun

2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Kelurahan.

Surat Edaran ini mengatur bagaimana prioritas utama di setiap wilayah Kelurahan hingga RT/RW dalam pembentukan posko penanganan Covid-19. Untuk pembentukan posko di koordinasi melalui kecamatan dan Tim Satgas Covid-19. Dalam PPKM Mikro ini juga diatur tentang pembentukan posko penanganan Covid-19 melalui koordinasi antara semua unsur yang terlibat, Kebijakan ini dikeluarkan setelah PPKM tahap I dan II yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM berbasis Mikro Hingga saat ini Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro masih terus diperpanjang melihat kondisi Kota Malang saat ini masih belum stabil. Dimana mana sekarang sudah memasuki tahap ke-4 yang akan terus diperpanjang hingga keadaan pulih dan sesuai dengan instruksi dari Pemerintahan Pusat.

Sesuai dengan Instruksi Kementerian Dalam Negeri, Malang menjadi satu kawasan yang wajib menerapkan PPKM Mikro karena masuk dalam Zona Merah Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Penerapan kebijakan PPKM Mikro di Kota Malang, di Kota Malang terdapat 12 Kelurahan yang menjadi skala prioritas. Di mana 12 Kelurahan tersebut masuk dalam kategori Zona Merah dan Zona Orange. Salah satu dari 12 Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Tlogomas. Kelurahan Tlogomas masuk dalam kategori Zona Merah sehingga Kelurahan Tlogomas menjadi prioritas pelaksanaan kebijakan PPKM berbasis Mikro.

Dalam menerapkan sebuah kebijakan tentu akan ada permasalahan yang terjadi. Ini dapat dilihat berdasarkan kendala dalam pencapaian tujuannya. Dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis Mikro guna mengurangi kasus Covid-19 di Kelurahan Tlogomas masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Seperti, ketidakpatuhan masyarakat Kelurahan Tlogomas dalam pembatasan kegiatan khususnya di tempat umum seperti pasar, warung makan, kafe atau warung kopi dan masih ada masyarakat yang belum melakukan protokol secara baik dan tepat. Setelah meninjau kendala yang ada pada Kelurahan Tlogomas dalam implementasi Kebijakan PPKM Mikro, maka perlu ditinjau sejauh mana implementasi kebijakan tersebut dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan PPKM Mikro di Kelurahan Tlogomas ?

17

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan PPKM Mikro di Kelurahan Tlogomas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan PPKM Mikro di Kelurahan Tlogomas.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan PPKM Mikro.

1.4. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Kiranya penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam implementasi kebijakan PPKM Mikro.

Siti Khairunnisa Hidayat

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	adoc.pub Internet Source	2%
2	jatim.tribunnews.com Internet Source	2%
3	scholar.unand.ac.id Internet Source	2%
4	text-id.123dok.com Internet Source	2%
5	repository.upnvj.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	1%
7	wartakota.tribunnews.com Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	1%
9	abihandoko.blogspot.com Internet Source	1%

10	123dok.com Internet Source	1 %
11	eprints.ums.ac.id Internet Source	1 %
12	Ida Susilaksmi, Yohanes Anggoro Triharyanto, M Zulkham Yahya, M Mufti Sadewa, Samsul S Hidayat. "MENGHADAPI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DARI PANDEMI COVID 19 PADA BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BATANG", RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, 2020 Publication	1 %
13	www.kemlagi.desa.id Internet Source	1 %
14	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
16	docplayer.info Internet Source	1 %
17	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
18	pshk.uii.ac.id Internet Source	1 %
19	repository.uinjkt.ac.id	

Internet Source

1 %

20

repository.upi.edu

Internet Source

1 %

21

ejournals.fkwu.uniga.ac.id

Internet Source

1 %

22

m.kominfo.go.id

Internet Source

1 %

23

repository.lppm.unila.ac.id

Internet Source

1 %

24

www.antaranews.com

Internet Source

1 %

25

www.jogloabang.com

Internet Source

1 %

26

www.semanticscholar.org

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On